

PT PMP Tebang Pohon Pelindung Tanpa Izin

DINAS Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok berang dengan ulah PT Prima Mas Perkasa (PT PMP): perusahaan pengembang itu menebang pohon pelindung di Jalan Raya Sawangan tanpa izin. "Pengembang PT PMP harus bertanggung jawab karena menebang pohon tanpa izin," kata Kepala DKP, Ulis Sumardi, Senin (5/9).

Menurut Ulis, surat akan dilayangkan seminggu setelah Lebaran. Mereka tidak boleh menebang pohon angkana berdiameter 75 sentimeter (cm) seenaknya. Apalagi tanpa memberi tahu DKP. "Setelah habis libur Lebaran, kami akan melayangkan surat panggilan kepada pengelola PT PMP. Mereka seenaknya saja menebang pohon jenis angkana yang sudah berdiameter 75 sentimeter itu tanpa ada izin dari DKP maupun Pemkot Depok," katanya, kesal.

Dikatakan, pihak DKP sama sekali tidak pernah mengeluarkan izin terkait penebangan pohon pelindung di pinggir jalan pintu masuk perumahan Sawangan Baru itu. "Soal penebangan pohon bisa saja dilakukan asal untuk kepentingan umum. Itu pun setelah ditebang harus ada penggantinya," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Kepala Bidang Pertamanan DKP Kota Depok, Mulyo Handono. Menurutnya, penebangan pohon pelindung tidak saja dilakukan di Jalan Raya Sawangan, melainkan juga di depan toko furnitur di Kelurahan Rangkapan Jaya. Tentu, kini pohon pelindung tersebut tidak terlihat lagi.

Menurut Mulyo, stafnya sudah berupaya agar pohon pelindung itu tidak ditebang dengan cara menempel pengumuman di batang pohon. Namun, kenyataannya pohon tersebut tetap ditebang. "Kami akan menindak tegas pengusaha yang melakukan penebangan pohon. Jika tidak, dikhawatirkan semua pohon pelindung yang sudah berusia tua terus ditebangi tanpa mempertimbangkan dampaknya," kata Mulyo.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sawangan Baru, Aman Suherman, mengatakan, penebangan pohon pelindung oleh pengembang PT PMP disebabkan sudah mendapat restu dari oknum Sekretaris Kelurahan Sawangan Baru dengan menerima sejumlah uang.

Aman mengatakan, uang yang diserahkan pengembang senilai Rp3 juta. Uang itu dimaksudkan untuk memperoleh izin dari DKP. Izin tidak dikeluarkan, tapi pengembang sudah menebang pohon pelindung. "Maka itu, saya minta kepada DKP segera memanggil pengembang. Gara-gara penebangan pohon itu, kawasan Jalan Raya Sawangan jadi gersang," katanya. n Iskandar Hadji